

ISSU-ISSU PENELANTARAN, PENGUCILAN DAN KERENTANAN ANAK DI JAKARTA BARAT

Anwar Sitepu* dan Irmayani**

ABSTRACT

The study shows that in West Jakarta, there are many children experience deprivation, exclusion and vulnerability (DEV). Children do not acquire their rights to grow and develop optimally, apprehensive, because it all stake holders need to work harder. Deprivation issues that stand out are: children are not brought to the neighborhood health center, infants not given breast milk (milk), exclusively, infant malnutrition / malnutrition, children do not have access to early childhood education (ECD), children do not have birth certificates and school dropouts. Exclusion of important issues are: poor children excluded from education, children are employed, the daughter of high school is deemed not necessary. While the issue of vulnerability of children is: dropout-prone, vulnerable to contracting communicable diseases, prone to become victims of disaster, prone to become victims of bad influence of the environment, prone to become victims of crime. DEV in West Jakarta due to a variety of interrelated reasons (complex) such as: lack of knowledge and awareness of parents, poverty, divorce and lack of public service facilities and the lack of security and social protection. Family as the first and foremost responsible for the development of the child fails to perform its function properly.

Key words: children, deprivation, exclusion, vulnerability

I. PENDAHULUAN

Pentingnya memberi perhatian khusus terhadap anak telah menjadi kesadaran global, dibuktikan dengan disepakatinya sejumlah konvensi dan rencana aksi antar bangsa yang ditetapkan khusus untuk kepentingan terbaik anak. Beberapa konvensi diantaranya adalah: Konvensi Hak-hak Anak; Konvensi mengenai Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan, dan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sedangkan rencana aksi dalam dekade terakhir adalah yang dipopuler dengan tujuan menciptakan dunia yang layak bagi anak, *a world fit for children*.

Dalam konvensi-konvensi tersebut selain ditetapkan hak-hak anak, juga ditegaskan

bahwa setiap negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi semua konvensi tersebut dan juga telah berupaya keras melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak anak. Beberapa kebijakan nasional yang fokus pada kepentingan anak adalah: Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak; UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan Anak; UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengatasi masalah anak, sebagai masalah kemanusiaan, menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa bahkan seluruh umat manusia. Di Indonesia partisipasi masyarakat dalam penanganan anak diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

pelayanan dalam panti sosial, penyelenggaraan rumah singgah, penyelenggaraan pendidikan formal (sekolah swasta), pendidikan informal (PAUD), penyelenggaraan POSYANDU. Beberapa waktu belakangan dunia usaha semakin banyak melakukan CSR dalam bentuk pemberian bea siswa. Pada tingkat internasional, terdapat banyak lembaga internasional (*non government organization, NGO*) yang bekerja fokus pada penanganan masalah anak di sejumlah negara. Beberapa NGO internasional yang beroperasi menangani masalah anak di Indonesia adalah *Save The Children, Child Fund International, World Vision, Plan International*.

Penelitian ini dilakukan dalam rangkaian upaya penanganan masalah-masalah anak khusus di Jakarta Barat, yang diprakarsai oleh Yayasan Sosial Dharma Kasih. Yayasan ini merupakan organisasi sosial lokal, yang didirikan oleh warga setempat yang peduli pada kesejahteraan anak-anak. Operasional Yayasan diselenggarakan melalui dua badan yang disebut Proyek Tunas Kasih dan Proyek Kincir. Sebagai perpanjangan tangan Yayasan, kedua Proyek sejak awal fokus pada upaya menciptakan kondisi yang lebih baik bagi anak. Suatu kondisi yang memungkinkan tumbuh kembang anak secara optimal. Kini Proyek Kincir maupun Proyek Tunas Kasih tengah berbenah, menyusun rencana kerja yang disebut Pemberdayaan Masyarakat berfokus pada Anak, untuk jangka menengah, 2010 – 2012. Sesuai dengan kebijakan CFI sebagai lembaga afiliasi, ke depan Proyek Kincir bersama Proyek Tunas Kasih diproyeksikan mampu memberi kontribusi lebih luas dan signifikan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan seputar kesejahteraan anak, di tingkat wilayah Kota Administratif Jakarta Barat. Penelitian ini merupakan asesmen situasi, yang dilakukan sebagai langkah awal penyusunan rencana kerja dimaksud. Tujuannya adalah: mengidentifikasi bentuk-bentuk dan besaran masalah penelantaran, pengucilan dan kerentanan atau *deprivation, exclusion and vulnerability* (DEV) anak di wilayah Kota Administratif Jakarta Barat.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data dan informasi primer dan skunder. Data primer meliputi bentuk-bentuk penelantaran, pengucilan dan kerentanan anak; respon pemerintah dan masyarakat atas bentuk-bentuk DEV tersebut. Pengumpulan data

dan informasi tersebut dilakukan di dua kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan berbeda, yaitu: 1) Kelurahan Kamal di Kecamatan Kali Deres dan 2) Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng. Di masing-masing kelurahan, pengumpulan data primer dilakukan di lokasi terbatas, yaitu: 1) RT 03 RW 08 dan RT 09 RW 05 di Kelurahan Kamal; 2) RT 10 RW 16 dan RT 14 RW 16 di Kelurahan Kapuk.

Lokasi dipilih dengan sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat mewakili potret wilayah pemukiman miskin. Wilayah miskin diyakini merupakan wilayah dimana masalah atau isu DEV berpeluang lebih banyak terjadi dibanding wilayah tidak miskin. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik *Fokus Group Discussion (FGD)* dan atau *Indepth Interview* didukung pengamatan. Di masing-masing lokasi, FGD dilakukan terpisah dengan peserta dari kelompok berbeda, yaitu: 1) Tokoh masyarakat (Kamal 6 orang; Kapuk 6 orang); 2) Orang tua dari anak putus sekolah (Kamal 9 orang; Kapuk 8 orang); 3) Anak laki-laki dan anak perempuan putus sekolah (Kamal 14 orang, Kapuk 7 orang). *Indepth interview* dilakukan terhadap: 1) Pengurus RT, RW, orangtua anak putus sekolah, anak putus sekolah dan guru (4 orang) dan Pengurus Posyandu. Informan dipilih dengan teknik *purposive*, yaitu mereka yang dipandang memiliki informasi terkait dan relevan. Untuk mengetahui cakupan masing-masing bentuk (isu) masalah dikumpulkan data skunder dari berbagai instansi pemerintah di wilayah Kota Jakarta Barat. Penelitian dilaksanakan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, selama tiga bulan, 15 Februari sampai 15 Mei 2010.

II. TINJAUAN KONSEP

Di Indonesia batasan usia anak ditetapkan berbeda dalam beberapa undang-undang terkait anak. Dalam UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak, orang dipandang sebagai anak adalah yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun (Pasal 1 ayat 1). Dalam UU No. 6/1979 tentang Kesejahteraan Anak, dirumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 2). Dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasaran, ditetapkan bahwa seseorang dipandang

sebagai anak sampai maksimum berumur 18 tahun (Pasal 1 ayat 8). Kemudian dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak meliputi seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). Mencermati semua undang-undang tersebut, tampak bahwa batasan usia cenderung ditetapkan sesuai visi dan misi masing-masing undang-undang. Undang-undang Perlindungan Anak misalnya memasukkan janin dalam kandungan termasuk sebagai anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak memasukkan orang berusia kurang dari 21 tahun sebagai anak, sedangkan undang-undang lain, memberi batasan dari 0 hingga 18 tahun.

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan anak adalah orang berusia dari 0 sampai 20 tahun. Batasan ini mencakup semua orang yang belum berulang tahun ke-21, seperti ditetapkan dalam UU RI No.6/1979. Batasan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan: pertama, diyakini bahwa secara umum seseorang yang belum berusia 21 tahun secara sosial belum mampu memutuskan tindakan terbaik untuk dirinya sendiri. Tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dapat dicapai pada umur tersebut (Penjelasan UU Kesejahteraan Anak); kedua, agar kajian lebih fokus, tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan seperti batasan pada UU RI No.3/2003. Dengan menggunakan batasan umur hingga meliputi semua orang yang belum berusia 21 tahun, dimaksudkan untuk mencakup baik anak usia balita, pra sekolah, usia sekolah hingga usia remaja.

Masalah kesejahteraan anak dapat diidentifikasi dalam tiga klasifikasi berdasarkan sifatnya, yaitu : penelantaran, pengucilan dan kerentanan. Pengertian masing-masing konsep adalah sebagai berikut:

1) *Deprivation* (penelantaran) dipahami sebagai kurangnya material dan layanan yang dipandang penting bagi tumbuh kembang (perkembangan potensi) anak secara utuh (Ditto Santoso, 2008). Menyimak pengertian tersebut, penelantaran mengandung makna sangat luas, meliputi atau menunjuk seluruh wilayah kekurangan material dan kekurangan layanan yang dibutuhkan setiap anak untuk memung-

kinkan dirinya bertumbuh dan berkembang optimal. Termasuk dalam penelantaran adalah: anak kekurangan sandang, pangan dan papan. Selain itu, anak yang tidak memiliki akses atas pelayanan kesehatan, pendidikan.

2) *Exclusion* (pengucilan) melihat pada proses dimana seorang atau sekelompok anak secara utuh maupun terpisah mengalami ketertindasan atau ketidakadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat dimana dia tinggal (Ditto Santoso, 2008). Anak bisa tereksklusi karena banyak alasan, bahkan mungkin juga oleh anak lain. Terdapat empat jenis eklsu yang berpotensi untuk berkontribusi pada proses pemiskinan anak, yaitu:

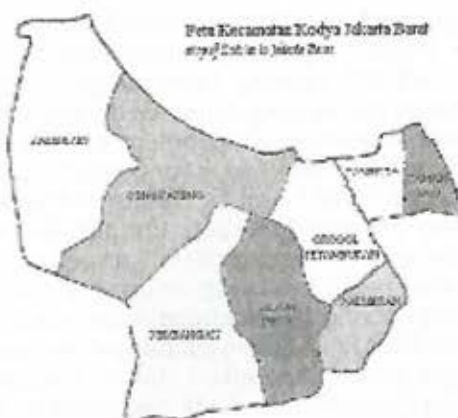
- Status sosial atau stigma (misal: seorang anak dijauhi karena dia anak eks tapol)
- Pengelompokan dalam masyarakat (Misal: seorang anak tidak diajak bermain oleh teman-temannya karena dia beda agama)
- Status ekonomi (misal: seorang anak imigran perkotaan tidak bisa memperoleh layanan kesehatan publik karena orangtuanya tidak memiliki KTP atau KK)
- Bias budaya (misal: anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena nantinya akan menjadi ibu rumah tangga juga)

3) *Vulnerability* (kerentanan) dipahami sebagai kerawanan yang timbul dari ancaman yang eksis maupun potensial bagi anak-anak, namun masyarakat tidak berdaya mengatasinya. Inti dari vulnerability adalah bagaimana ketahanan anak dalam menghadapi masalah-masalah yang menghampiri dirinya. Masalah ini bisa jadi tidak timbul dari anak, melainkan dari lingkungan di sekitarnya. Misalnya: seorang anak terancam berhenti dari sekolah karena orangtuanya sakit parah, tidak mampu bekerja, sehingga tidak mampu pula membayar biaya pendidikannya. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman nyata maupun potensial terhadap anak-anak di lingkungan mereka (Ditto Santoso, 2008).

III. GAMBARAN UMUM WILAYAH JAKARTA BARAT

Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi wilayah seluas 129,19 Km², secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 56 kelurahan, 579 rukun warga (RW) dan 6.403 rukun tetangga (RT). Kecamatan terluas, pertama adalah Kecamatan Kali Deres, dengan wilayah seluas 30,23 Km² dan kedua adalah Kecamatan Cengkareng dengan luas 26,54 Km². Keduanya meliputi 21,40 dan 20,54 persen dari seluruh wilayah Jakarta Barat. Kedua kecamatan terletak bersebelahan, merupakan wilayah paling barat Jakarta Barat (lihat peta dan tabel dibawah). Penelitian difokuskan di dua kecamatan tersebut. Kecamatan Cengkareng terdiri dari 6 kelurahan, dengan 84 RW, 996 RT, dengan penduduk sebanyak 304.742 jiwa, meliputi 95.873 KK, dengan kepadatan 11,482 jiwa / Km². Sedangkan Kecamatan Kalideres, terdiri dari 5 kelurahan, 73 RW, 743 RT, dengan penduduk sebanyak 70.853 KK, meliputi 250.807 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 8,297 jiwa / Km².

Penduduk wilayah Kota Jakarta Barat meliputi sebanyak 1.622.636 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 821.554 jiwa (50,6 persen) dan perempuan sebanyak 801.082 jiwa (49,4 persen). Menurut golongan usia lima tahunan, penduduk terbanyak adalah golongan usia 25 sampai 29 tahun, yaitu sebanyak 214.275 jiwa.. Menurut wilayah kecamatan, penduduk terbanyak, pertama terdapat di Kecamatan Cengkareng yaitu sebanyak 304.742 jiwa (18,8 persen) dan terbanyak kedua di Kecamatan Kali Deres, sebanyak 250.807 jiwa (15,5 persen). Penduduk Jakarta Barat cukup heterogen, terdiri dari berbagai etnis, memeluk berbagai agama dan dengan kelas sosial ekonomi beragam. Kelompok etnis asli adalah Betawi. Kelompok etnis lain yang menonjol secara kuantitatif adalah Jawa, Sunda dan Tionghoa. Di wilayah ini terdapat kelompok penduduk keturunan Cina (Tionghoa) yang dikenal dengan sebutan Cina Benteng (Cibeng). Selain kelompok etnis tersebut, penduduk lain terdiri dari berbagai etnis lain dari wilayah Indonesia. Agama yang paling banyak dianut penduduk adalah Islam. Penduduk lain menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.



Sumber JBDA, 2009

Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat juga merupakan kawasan perdagangan, jasa dan industri. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Jakarta Barat tahun 2007 tercatat sebanyak 816 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 69.033 orang (JBDA, 2009 tabel 6.2). Perusahaan industri yang terdapat di Jakarta Barat (JBDA, 2009 Tabel 6.3) sebagian besar bergerak di bidang industri pakaian jadi (27,69 persen), urutan kedua adalah industri karet dan barang dari karet (14,82 persen). Jumlah pedagang kaki lima di Jakarta Barat tahun 2008 tercatat sebanyak 1.353 pedagang (JBDA, 2009 Tabel 6.11).

IV. ISSU PENELANTARAN, PENGUCILAN DAN KERENTANAN ANAK

A. Penelantaran (Deprivation)

1. Balita tidak dibawa ke posyandu

Anak merupakan kelompok rentan, terlebih-lebih bayi usia di bawah lima tahun. Secara fisik anak masih begitu lemah sehingga mudah mengalami gangguan kesehatan, apabila tidak dirawat dengan baik, kelangsungan hidup anak bahkan terancam. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu ibu merawat bayinya adalah dengan menyelenggarakan pemantauan tumbuh kembang anak balita melalui Posyandu. Permasalahannya adalah banyak balita tidak dibawa ibunya ke Posyandu. Dalam diskusi di Kamal maupun Kapuk, pengurus Posyandu mengungkapkan hal yang serupa, banyak balita yang tidak dibawa ke Posyandu. Alasan yang sering diungkapkan oleh ibu dari balita adalah

kesibukan mereka bekerja, mengurus pekerjaan rumah tangga maupun mencari nafkah. Alasan lainnya adalah: anak sedang tidur atau lupa. Hal yang perlu diwaspadai adalah; 1) anak tidak dibawa ke Posyandu justru karena berat badannya tidak naik; 2) menghindari diimmunisasi.

Data Sudin Kesehatan Jakarta pada Januari 2010 menunjukkan bahwa di seluruh wilayah Jakarta Barat terdapat sebanyak 131.142 orang anak usia 0 sampai 5 tahun, tetapi yang terdaftar di Posyandu dan memiliki KMS sebanyak 109.092 orang (83,18 persen). Hal tersebut berarti terdapat sebanyak 22.150 orang anak (16,82 persen) yang tidak terdaftar dan tidak memiliki KMS sehingga pertumbuhan dan perkembangannya tidak terpantau. Kemudian dari 109.092 orang yang terdaftar dan memiliki KMS ternyata tidak seluruhnya dipantau / diukur secara teratur setiap bulan, karena tidak dibawa oleh orangtuanya ke Pos Penimbangan. Pada bulan Januari 2010 misalnya, yang datang dan ditimbang hanya 56.673 orang, kurang dari setengahnya, 43,21 persen (lihat Tabel 1 terlampir).

Pola yang sama terjadi di semua wilayah kecamatan di Jakarta Barat. Di Kecamatan KD, terdapat sebanyak 27.532 orang anak usia 0 – 5 tahun, sementara yang terdaftar dan memiliki KMS hanya 19.511 orang (70,86 persen), lainnya sebanyak 8.021 orang (29,14 persen) tidak terdaftar dan tidak memiliki KMS. Dari 19.511 orang yang terdaftar ternyata juga hanya sebagian kecil yang rutin ditimbang, pada bulan Januari 2010 yang lalu misalnya hanya 6.088 orang (22,11 persen). Di Kecamatan Cengkareng kondisinya tidak berbeda jauh, anak usia 0 – 5 sebanyak 35.487 orang, yang terdaftar sebanyak 30.585 orang (86,18 persen), lainnya 4.902 orang (13,81 persen) tidak terdaftar, pada bulan Januari 2010 yang ditimbang 12.017 orang.

2. Bayi tidak diberi air susu ibu (ASI) eksklusif

Idealnya seorang bayi dari lahir hingga usia 6 bulan tidak diberi makanan selain ASI, seluruh kebutuhan makan dan minumannya dipenuhi hanya dengan ASI, yang disebut ASI eksklusif. Akan tetapi kenyataannya dengan berbagai alasan, hanya sedikit sekali bayi memperoleh ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Di seluruh Jakarta Barat hanya sebanyak 2.483 orang (17,77 persen) dari 13.968 orang bayi

usia 0 sampai 5 bulan 29 hari yang hanya diberi ASI eksklusif hingga pada usia 29 hari. Bayi lainnya langsung diberi makanan lain selain ASI, bahkan terdapat bayi yang sejak lahir tidak pernah diberi ASI, 13,47 persen (JBDA, 2009: 128). Dalam diskusi baik di Kapuk maupun di Kamal, isu ini kurang mencuat. Hal demikian mungkin terjadi karena peserta belum memahami pentingnya ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak.

3. Bayi dengan gizi buruk / kurang

Di wilayah Jakarta Barat belum semua balita memperoleh cukup asupan sehingga pertumbuhannya tidak atau kurang baik. Pada bulan Januari 2010 misalnya, dari sebanyak 56.673 orang yang ditimbang ternyata terdapat sebanyak 9.715 orang (17,14 persen) yang berat badannya (BB) tidak naik dan sebanyak 1.741 orang (3,07 persen) diantaranya malah dua bulan berturut-turut tidak naik (Sudin Kes.Jak.Bar, Jan 2010). Kondisi ini pertanda bahwa mereka tidak memperoleh cukup asupan gizi, atau menghadapi masalah tertentu. Di Kecamatan Cengkareng juga ditemukan kasus yang sama, dari sebanyak 12.017 orang yang ditimbang, sebanyak 2.047 orang (16,95 persen) berat badannya tidak naik, dan sebanyak 1.198 orang (9,96 persen) bahkan dua kali berturut-turut tidak naik. Demikian juga di Kecamatan Kali Deres, dari sebanyak 6.088 orang yang ditimbang pada bulan yang sama sebanyak 1.198 orang tidak naik dan sebanyak 340 orang bahkan dua kali berturut-turut tidak mengalami kenaikan BB. Di seluruh wilayah Jakarta Barat terdapat balita dengan berat badan berada di bawah garis merah (BGM) sebanyak 1.497 orang, sebanyak 183 orang diantaranya berada di Kecamatan Cengkareng dan 369 orang di Kecamatan Kali Deres (lihat tabel 2 terlampir).

4. Anak tidak memperoleh akses atas pendidikan anak usia dini (PAUD)

Peserta didik PAUD non formal, termasuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) meliputi anak usia 3 sampai 6 tahun. Menurut catatan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat banyaknya peserta didik PAUD tahun 2009, seluruhnya adalah 7.430 orang dan Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 20.839 orang (tidak ada rincian menurut jenis kelamin dan umur). Sedangkan jumlah seluruh populasi anak

3 sampai 6 tahun sebanyak 160.960 orang. Karena itu, anak umur dibawah 3 - 6 tahun yang tidak atau belum memiliki akses ke PAUD termasuk TK meliputi sebanyak 132.691 orang atau sebesar 82,43 persen dari total populasi. Jumlah tersebut berasal dari total populasi dikurangi peserta didik PAUD non formal dan TK. Data ini mengandung makna bahwa baru sebagian amat kecil anak usia dibawah 6 tahun yang beruntung, 17,57 persen, memiliki akses masuk PAUD formal atau non formal. Sementara sebagian besar lainnya belum beruntung, belum memperoleh akses.

5. Anak tidak / belum memiliki Akte Kelahiran

Setiap orang bayi berhak memiliki identitas pribadi, termasuk akte kelahiran. Namun, seperti ditemui di lokasi, banyak anak belum memilikinya karena berbagai sebab. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat tidak memiliki data rinci tentang anak yang memiliki atau tidak memiliki akte kelahiran. Data yang tersedia hanya mencakup banyaknya Akte Kelahiran yang diterbitkan menurut tahun dan klasifikasi persyaratan umum atau dispensasi. Data juga tidak terinci menurut jenis kelamin dan wilayah. Pada tahun 2009 anak yang berusia dibawah 6 tahun atau lahir pada tahun 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 sebanyak 248.136 orang. Sementara jumlah akte kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2005 sampai akhir 2009 sebanyak 269.497 lembar, terdiri dari klasifikasi umum sebanyak 143.264 lembar dan klasifikasi dispensasi sebanyak 126.232 lembar. Klasifikasi umum meliputi akte yang diterbitkan sesuai ketentuan, yaitu sebelum anak berusia 60 hari. Sementara itu Klasifikasi Dispensasi adalah akte kelahiran diterbitkan di luar persyaratan, anak sudah berusia lebih dari 60 hari atau orangtua tidak memiliki akte perkawinan.

6. Anak Putus Sekolah

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa banyak anak mengalami putus sekolah ketika berada pada usia antara 7 sampai 15 tahun, ketika masih duduk di SD atau SMP. Di lingkungan RT 03/08 Kelurahan Kamal, dari 15 orang anak di bawah 20 tahun yang berhasil diidentifikasi sebagai anak putus sekolah, 10 orang di antaranya putus ketika masih duduk di SD, ketika berusia di bawah 12 tahun dan 5 orang lainnya putus sekolah ketika duduk di SMP (lihat kasus terlampir). Mereka keluar dari sekolah dengan alasan: 1) Tidak mampu

menyediakan biaya (miskin); 2) Tidak mampu mengikuti pelajaran; 3) Dimarahi guru; 4) Malas (bangun pagi).

Data resmi Sudin Dikdas dan Sudin Dikmen, seluruh wilayah Kota Adm. Jakarta Barat, pada tahun ajaran 2008/2009 pada tingkat SD sebanyak 393 orang mengalami putus sekolah. Pada tingkat SMP dan SLTA pada tahun yang sama anak putus sekolah lebih banyak lagi, di SMP meliputi sebanyak 636 orang dan SLTA sebanyak 710 orang. Putus sekolah yang dimaksud adalah meliputi semua anak usia sekolah 7 sampai 18 tahun yang sudah tidak sekolah.

Banyaknya total anak putus sekolah pada jenjang SD dapat dihitung dengan mengurangi populasi anak usia 7 sampai 12 tahun dengan banyaknya murid SD dan MI. Murid SD dan MI di wilayah Kota Jakarta Barat tahun 2008/2009 sebanyak 210.608 orang, dan populasi anak usia SD, 7 sampai 12 tahun, pada tahun yang sama, sebanyak 208.890 orang. Data tersebut seolah menunjukkan bahwa seluruh populasi anak pada tahun 2008/2009 sudah ditampung di sekolah, bahkan jumlah murid lebih banyak dari populasi. Namun faktanya tidak demikian, terdapat anak usia SD yang belum masuk atau sudah keluar (putus sekolah).

Lebih banyaknya jumlah murid SD dibanding dengan populasi anak usia sekolah, 7 sampai 12 tahun, dapat terjadi karena: 1) Realitas di lapangan anak usia kurang dari 7 tahun sudah masuk menjadi murid SD; 2) Sebagian murid berasal dari luar wilayah. (Catatan: Pemda DKI menetapkan setiap sekolah negeri di Jakarta dapat menerima murid asal luar DKI Jakarta maksimal sebanyak 5 persen dari total murid). Sementara itu, murid SLTP (SMP dan MT) di seluruh Jakarta Barat tahun 2008/2009 terdapat sebanyak 83.635 orang, pada sisi lain populasi anak usia SMP, 13 sampai 15 tahun sebanyak 90.710 orang. Dengan sederhana, hal ini berarti bahwa terdapat sebanyak 7.075 orang anak yang tidak masuk SMP/MI di Jakarta Barat.

Jika digabung, populasi anak usia 7 sampai 15 tahun, meliputi sebanyak 299.600 orang. Sementara jumlah murid SD/MI dan SMP/MT meliputi sebanyak 294.243 orang. Selisih populasi dan murid pendidikan dasar di wilayah Kota Adm Jakarta Barat sebanyak 5.357 orang (1,79 persen). Secara sederhana anak putus sekolah pada tingkat pendidikan

dasar (SD-SLTP) adalah sebanyak 5.357 orang. Namun angka tersebut diyakini terlalu sedikit/kecil. Alasannya: *Pertama*, fakta di lapangan anak masuk SD mayoritas berusia kurang dari 7 tahun. Populasi anak 299.600 orang belum meliputi usia 6 tahun (sebanyak 33.338 orang); *Kedua*, fakta sebagian murid pendidikan dasar berasal dari luar wilayah. Dengan asumsi 20 persen anak usia 6 tahun sudah masuk SD (= 6.667 orang) dan murid dari luar wilayah sebesar 1 persen dari total murid (= 2.942 orang), maka banyaknya anak putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar di Jakarta Barat adalah 14.966 orang.

Pada anak usia 16 sampai 18 tahun, angka putus sekolah lebih tinggi, di seluruh Jakarta Barat populasinya meliputi sebanyak 135.462 orang, sementara murid SLTA hanya meliputi 75.981 orang (56,09 persen). Data tersebut memperlihatkan bahwa terdapat selisih antara murid dengan total populasi anak usia SLTA, sebanyak 59.481 orang (43,91 persen). Walaupun tidak dapat diklaim mutlak bahwa angka tersebut merupakan angka putus sekolah pada tingkat SLTA, tetapi angka tersebut dapat dipandang minimal sebagai perkiraan kasar.

7. Anak jalanan

Anak jalanan yang dimaksud adalah anak yang berkeliaran di jalanan. Kegiatan anak jalanan yang dominan terlihat adalah ngamen, lainnya jualan dan ngemis (lihat kasus terlampir). Di seluruh Jakarta Barat menurut catatan Suku Dinas Sosial setempat terdapat sebanyak 1.305 orang anak jalanan. Namun patut dicatat anak jalanan memiliki sifat dinamis, sehingga angka tersebut dapat berubah cepat. Asesmen anak jalanan yang dilakukan Suku Dinas Sosial setempat selama dua hari di lima lokasi di Jakarta Barat (Februari 2010) menemukan sebanyak 251 orang anak jalanan. Mereka berusia antara 2 sampai 20 tahun, terdiri dari 186 orang anak laki-laki dan 65 orang anak perempuan. Data tersebut bukan mencerminkan keseluruhan populasi anak jalanan, tetapi hanya sebagai potret atas hasil asesmen selama dua hari di lima lokasi itu saja. Sebagai gambaran dari 251 orang anak jalanan hasil penjarangan tersebut ternyata paling banyak ditemukan di seputar perempatan Cengkareng yaitu 115 orang. Mereka terdiri dari 90 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, paling banyak berusia sekolah dasar, 6 sampai 12

tahun, 45 orang dan usia SMP, 13 sampai 15 tahun sebanyak 37 orang. Menurut status pendidikannya, dari 90 orang anak laki-laki, lebih dari setengahnya sudah tidak bersekolah, 48 orang, dan terdapat sebanyak 3 orang anak yang berusia antara 6 sampai 12 tahun belum pernah sekolah. Sementara itu dari 25 orang anak perempuan sebagian terbesar, 15 orang masih sekolah.

B. Pengucilan (Exclusion)

1. Anak keluarga miskin dikucilkan dari pendidikan

Sadar atau tidak anak dari keluarga miskin telah dikucilkan dari kesempatan memperoleh pendidikan yang baik. Pada anak usia dini, ketika dia perlu pendidikan PAUD mereka tidak bisa masuk TK (PAUD Formal) karena tidak memiliki biaya. Ketika tamat SD mau mendaftar di SMP Negeri, pilihan ditentukan berdasarkan NEM, anak yang memiliki NEM tinggi berhak masuk di SMP Negeri yang bermutu, anak dengan NEM yang lebih rendah diterima di SMP Negeri yang mutunya lebih rendah. Demikian seterusnya, hingga anak dengan NEM terendah tidak dapat masuk di SMP Negeri. Mereka secara sistematis terkucilkan ke SMP Swasta yang kualitasnya rendah. SMP Swasta yang bermutu baik mengenakan biaya pendidikan yang mahal, tidak terjangkau oleh keluarga miskin, biasanya yang bersekolah disana anak dari keluarga menengah ke atas. Dengan demikian, anak dengan NEM rendah tidak ada pilihan kecuali SMP Swasta yang kurang bermutu.

Persoalannya adalah menurut biasanya anak dari keluarga miskin menghadapi banyak keterbatasan, kondisi rumah kurang nyaman untuk belajar (ruang dan fasilitas terbatas), peralatan penunjang tidak dimiliki, waktu terbatas karena harus bekerja, dukungan motivasi orangtua minim dan asupan gizi seadanya. Akibat berbagai keterbatasan tersebut pada umumnya NEM (prestasi) anak dari keluarga miskin rendah, dan pilihan sekolah lanjutan (SMP) terbatas pada SMP Swasta kurang bermutu. Demikian juga ketika lulus SMP, pilihan sekolah lanjutan pada tingkat berikutnya (SMA/SMK) ditentukan berdasarkan tinggi atau rendahnya NEM. Akibatnya setiap anak yang memiliki NEM lebih rendah, secara sistematis tersisihkan. Kesempatan mereka semakin sempit. Proses pengucilan lebih lanjut berlangsung melalui seleksi kemampuan ekonomi.

Walaupun seorang anak memiliki NEM yang memberi hak baginya masuk di SMP atau SMA/ SMK bermutu tetapi tanpa dukungan biaya memadai maka anak yang bersangkutan akan gagal masuk. Masalahnya sekolah bermutu, baik SMP maupun SMA, selalu menyelenggarakan kegiatan atau proyek yang memerlukan dukungan biaya dari orangtua. Oleh karena itu pada awal tahun masuk ke suatu sekolah, setiap anak dikenakan biaya sebesar tertentu. Anak dari keluarga tidak mampu cenderung memilih mundur.

2. Anak dipekerjakan

Pekerja anak diberi upah dengan tidak adil, melalui sistem borongan. Perlakuan seperti ini antara lain dialami oleh Marwan, anak laki-laki putus sekolah, 13 tahun di RT 03/08 Kelurahan Kamal. Sejak putus sekolah Marwan bekerja di sebuah usaha pembuatan bingkai foto yang terdapat di dekat tempat tinggalnya. Status Marwan pada pekerjaan tersebut membantu ibunya, yang bernama Elis. Elis mengajak Marwan dan tiga orang anak lainnya membantunya bekerja supaya hasilnya lebih banyak. Persoalannya Elis bekerja pada usaha tersebut dengan sistem upah borongan. Artinya, upah yang diterima tergantung pada banyaknya hasil kerja yang dilakukan. Elis dibayar sebesar Rp.600 setiap berhasil menyelesaikan satu lusin bingkai foto. Karena upah sangat kecil, walau Elis sudah bekerja maksimal maka penghasilan yang diperoleh tetap saja kecil. Menghadapi situasi demikian, Elis mengajak anaknya Marwan dan tiga orang anak lainnya membantunya bekerja di pabrik. Dengan bantuan 4 orang anak, Elis dalam sehari dapat menyelesaikan 100 lusin bingkai foto. Upah yang diterima sebesar Rp.60.000,-. Persoalannya adalah sistem pengupahan yang berlaku telah memaksa Elis mengorbankan Marwan, hak Marwan memperoleh pendidikan telah diabaikan. Elis sendiri telah menjadi korban sistem pengupahan yang berlaku. Elis tidak punya pilihan lain, posisi tawarnya sangat rendah atau bahkan nyaris tidak ada. Menghadapi situasi demikian pilihan yang tersedia mengarahkan seluruh potensi tenaga kerja yang dimiliki termasuk Marwan. Nyatanya Marwan dan anak lain telah dipekerjakan tetapi tidak diperhitungkan. Bagi pemilik usaha, yang menjadi pekerja adalah Elis dan Elis lainnya. Pada usaha yang sama terdapat 5 orang pekerja seperti Elis ibu

Marwan, masing-masing membawa sebanyak 4 orang "asisten", sehingga pekerja pada usaha itu meliputi 20 orang, namun yang "terdaftar" hanya 5 orang. Anak yang membantu tidak masuk dalam hitungan.

3. Anak diejek oleh anak lain

Ada kasus seorang anak perempuan tidak mau pergi ke sekolah karena sering diejek "belum mandi" oleh anak lain, teman sekelasnya sendiri. Kasus lain, seorang anak laki-laki diejek karena ayahnya kawin lagi. Kedua anak pada akhirnya memutuskan berhenti sekolah karena merasa malu.

4. Anak perempuan dipandang tidak perlu sekolah tinggi

Di masyarakat Jakarta Barat khususnya di kalangan bawah seperti terungkap dalam diskusi di RT 03/05 Kelurahan Kamal memandang anak perempuan tidak perlu sekolah hingga tinggi. Alasannya, anak perempuan kalau sudah dewasa kelak bekerja sekedar mengurus rumah tangga. Pandangan demikian tercermin oleh kiasan yang diungkap peserta diskusi, yaitu: "*anak perempuan kalau sudah besar kerjanya toh tidak jauh dari dapur, sumur dan kasur*". Pandangan demikian digunakan orangtua untuk membenarkan tindakannya memberhentikan anak perempuan dari sekolah.

C. Kerentanan (Vulnerability)

1. Rawan kelaparan atau kekurangan gizi.

Anak usia balita sangat rentan terhadap kekurangan pemenuhan kebutuhan fisik dasar. Kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar dapat berakibat fatal, berdampak pada kegagalan pertumbuhan optimal anak dan berpengaruh pada masa depannya. Dalam situasi kekurangan (miskin), anak balita dalam keluarga cenderung menjadi korban pertama karena belum mampu membela kepentingannya. Sepanjang tahun 2009 yang lalu, di seluruh wilayah Jakarta Barat terjadi 71 kematian bayi usia 0 sampai 59 bulan. Hal tersebut terjadi karena berbagai sebab dan pada berbagai kelompok usia. Kematian terbanyak terjadi pada usia kurang dari 28 hari, sebanyak 38 orang, kemudian lahir mati sebanyak 17 orang. Sebab kematian dapat digolongkan semua karena faktor ketidak berdayaan orangtua, kemiskinan,

2. Rawan putus sekolah

Anak dari kalangan keluarga miskin rawan putus sekolah karena tidak cukup "kuat" menopangnya, memenuhi biaya yang diperlukan. Di Jakarta Barat terdapat sebanyak 37.093 KK keluarga miskin dengan sebanyak 137.298 jiwa anggota keluarga. Diperkirakan 30 persen, sesuai dengan persentasi usia anak di Jakarta Barat, atau sebanyak 40.104 jiwa terdiri dari anak usia 0 – 20 tahun. Mereka seluruhnya merupakan anak rawan putus sekolah, atau khusus usia sekolah 6 – 18 tahun sebanyak 20.251 jiwa atau 14,74 persen dari populasi penduduk miskin. Berdasarkan wawancara dan data skunder dapat disimpulkan bahwa kelompok anak yang paling rawan putus sekolah adalah anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah di SMP dan SMA/K swasta "kecil". Ada kecenderungan putus sekolah lebih banyak terjadi di kelas satu dan kelas dua.

3. Anak balita rawan menjadi korban perdagangan

Anak balita laki-laki maupun perempuan dari keluarga miskin, rawan menjadi korban perdagangan. Beberapa waktu yang lalu terkuak fenomena di sebuah kampung di wilayah Jakarta Utara sebagian warganya sudah terbiasa menjual anak kandungnya sendiri. Kejadian yang serupa dikhawatirkan terjadi di wilayah Jakarta Barat, terutama pada keluarga miskin.

4. Anak remaja perempuan rawan menjadi "jablay", hamil di luar nikah, korban perdagangan orang.

Di wilayah Kapuk, menurut diskusi warga, ada indikasi sejumlah remaja putri menjadi "jablay". Hal tersebut didorong oleh aneka faktor, seperti: kondisi rumah tempat tinggal keluarga yang sangat sempit, sehingga mendorong mereka pergi ke luar rumah; kesulitan mencari uang; dan pada pihak lain terdapat peluang. Di lingkungan RT 10 dan RT 14 RW 16 Kapuk, menurut peserta diskusi sepanjang tahun 2009 masing-masing terdapat satu kasus serupa, jablay, lalu hamil di luar nikah dan kawin pada usia muda. Perempuan muda dari keluarga miskin juga rawan direkrut menjadi pekerja seks komersial dan tenaga kerja dengan iming-iming gaji besar. Terdapat banyak kasus di masyarakat luas di mana

perempuan muda dijadikan objek perdagangan. Ada indikasi perempuan muda mudah tergiur dengan tawaran yang menjanjikan gaji besar dengan pekerjaan mudah, sebagai pelayan restoran, pekerja salon dan lain sebagainya. Situasi demikian juga menempatkan anak remaja perempuan rawan kesehatan reproduksi.

5. Rawan terjangkit penyakit menular

Anak, terutama dari keluarga miskin di lingkungan kumuh diperkirakan paling rentan terserang berbagai penyakit menular seperti flu (burung, babi), DBD, muntaber atau penyakit menular lainnya. Anak dari keluarga miskin cenderung kurang mendapat cukup proteksi dan atau kurang memperhatikan kebersihan, termasuk kebiasaan mencuci tangan. Pada pihak lain lingkungan pemukiman kumuh diyakini menyimpan lebih banyak sumber penyakit, misalnya menjadi sarang berjangkitnya nyamuk. Oleh karena itu anak di wilayah kumuh diyakini memiliki resiko lebih tinggi menjadi korban berbagai penyakit menular atau penyakit lain yang dapat mewabah. Di Jakarta Barat teridentifikasi sebanyak 635 RT kumuh dengan penduduk sebanyak 36.500 kepala keluarga, meliputi 142.936 jiwa. Diperkirakan dari populasi tersebut terdapat sekitar 35 persen anak atau sebanyak lebih dari 50 ribu jiwa.

6. Rawan menjadi korban bencana banjir dan kebakaran

Anak dan keluarga miskin biasanya tinggal di wilayah yang kurang tertata dan tidak didukung dengan prasarana lingkungan yang baik, seperti jalan dan saluran drainase, seperti halnya wilayah RW 016 Kapuk, termasuk RT 10, 14 dan bahkan semua RT setempat. Wilayah demikian juga biasanya merupakan kawasan padat penduduk. Akibatnya wilayah tersebut rawan terjadi kebakaran dan sekaligus rawan kebakaran. Di seluruh wilayah Jakarta Barat terdapat sebanyak 729 RT rawan banjir dan 309 RT rawan kebakaran (Direktori Wilayah Kumuh, Rawan Banjir dan Rawan Kebakaran Kota Jakarta Barat, tahun 2009). Di wilayah Kecamatan Cengkareng terdapat sebanyak 42 RT dikategorikan rawan kebakaran, sebanyak 29 RT diantaranya terdapat di Kelurahan Kapuk. Dalam peristiwa banjir atau kebakaran anak adalah salah satu kelompok paling rentan menjadi korban. Anak cenderung belum

mampu menyelamatkan diri sendiri dalam situasi darurat.

7. Rawan menjadi korban pengaruh buruk lingkungan

Pada diskusi terungkap bahwa anak-anak di wilayah setempat banyak yang gandrung berlama-lama main di *play station*. Hal seperti tersebut dapat merugikan anak karena menghabiskan waktu untuk kegiatan yang kurang berguna, termasuk lupa belajar. Anak pada keluarga miskin cenderung sangat rentan pengaruh buruk dari lingkungan sekitar, karena pada satu sisi rumah tempat tinggal mereka sangat sempit sehingga membosankan, tidak ada sarana hiburan dan tempat bermain, orangtua cenderung sibuk dan kurang perhatian atas pendidikan anak. Akibatnya anak lebih banyak menggunakan waktu di luar rumah. Di luar rumah terdapat banyak hal yang mengancam, seperti *play station* dan *game on line*, mengundang anak menghabiskan waktu di sana. Adanya anak lain yang terlebih dahulu sudah putus sekolah sering mempengaruhi anak lain sehingga ikut berhenti sekolah. Selain itu, anak miskin juga rawan menjadi korban kejahatan, seperti penculikan karena cenderung kurang diawasi. Beberapa waktu lalu terkuak fenomena "Pak De", di mana dia (orang dewasa) membunuh puluhan anak jalanan pada waktu dan tempat berbeda. Diawali dengan memberi kasih sayang, memberi tempat dan perlindungan, kemudian pada kesempatan tertentu memperkosa dan membunuhnya. Modus seperti ini mengintai anak-anak lain, terutama anak yang kurang mendapat kasih sayang dan perlindungan dari keluarganya.

V. FAKTOR PENYEBAB DEV

Berdasarkan hasil diskusi, wawancara, dengan tokoh masyarakat, orangtua, guru dan anak di Kamal maupun Kapuk dapat dikemukakan bahwa DEV anak terjadi karena berbagai faktor yang saling terkait sehingga bersifat kompleks. Secara keseluruhan dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu: 1) Faktor internal keluarga, meliputi: kelemahan sumber daya manusia (orangtua), kemiskinan dan kehancuran keluarga; dan 2) Faktor eksternal keluarga, meliputi: kekurangan pada lembaga pelayanan anak.

1. Faktor internal keluarga.

a) Kelemahan orangtua. Misalnya: dalam hal pendidikan anak. Orangtua kurang menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Akibatnya orangtua kurang memberi motivasi kepada anak untuk sekolah. Fauzi, seorang guru, mengatakan: *banyak orangtua kalau sudah mendaftarkan anak di sekolah menganggap tugasnya sudah selesai*. Dalam hal kesehatan anak juga demikian, orangtua kurang menyadari pentingnya membawa anak ke Posyandu, kurang menyadari pentingnya imunisasi dasar yang lengkap, kurang menyadari pentingnya akte kelahiran. Marbun, pengurus Posyandu di Kapuk menuturkan: *"seorang ibu tega tidak mengambil susu yang disediakan gratis di Puskesmas untuk bayinya yang jelas sudah dinyatakan kurang gizi hanya karena tidak punya ongkos"*. Orangtua cenderung bersikap pragmatis, kurang gigih memperjuangkan kepentingan anak, bahkan mengucilkan anak. Hal itu tampaknya terjadi antara lain karena orangtua berpendidikan rendah, pengetahuan orangtua terbatas.

b) Kemiskinan. Karena miskin orangtua tidak mampu memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan anak lainnya dengan memadai, termasuk kebutuhan makan dan tempat tinggal yang layak. Uang dan buku sekolah di sekolah negeri memang gratis, tetapi tetap perlu uang untuk membeli macam-macam peralatan sekolah, seperti buku, alat tulis, sepatu, jajan dan transport anak. Karena itu menjadi putus sekolah; bayi kurang gizi; Anak tidak memperoleh akses atas pendidikan anak usia dini (PAUD); Anak tidak / belum memiliki Akte Kelahiran; Anak Terlantar; Anak jalanan. Karena kemiskinan orang tua cenderung mendorong anak-anaknya untuk bekerja, meringankan kehidupan ekonomi keluarga, meski dengan bayaran yang sangat minim. *"Minimal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri"* imbuhan para orang tua. Karena kemiskinan orangtua tidak dapat menyediakan tempat

tinggal yang layak sehingga rentan jadi korban banjir, kebakaran, tertular penyakit dan lainnya.

- c) Keluarga berantakan. Ada banyak kasus (lihat lampiran) anak putus sekolah karena keluarga berantakan, orangtua bercerai atau salah satunya meninggal. Namun perceraian atau meninggalnya suami-isteri sering kali juga tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan. Kondisi keluarga berantakan, kawin cerai (disintegrasi keluarga). Dari kasus-kasus yang ditemukan tampak ada kecenderungan anak putus sekolah banyak berasal dari keluarga berantakan, suami-isteri kawin-cerai-kawin. Hal tersebut terkait langsung dengan kondisi kemiskinan. Ada kasus bapak sebagai tumpuan penghasilan keluarga di-PHK karena perusahaan tempat kerjanya bangkrut, kemudian meninggalkan keluarga sehingga ibu menanggung beban sendiri untuk menghidupi anak-anaknya, yang berakibat pada anak-anaknya tidak melanjutkan sekolah.

2. Faktor eksternal keluarga.

- a) Keterbatasan lembaga pelayanan. Dalam hal pendidikan anak usia dini lembaga yang tersedia masih sangat terbatas. Demikian juga pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, sekolah yang disediakan pemerintah tidak mencukupi untuk dapat menampung semua anak. Anak dari keluarga miskin cenderung tersisih.
- b) Suasana budaya lokal. Suasana budaya yang melingkupi keluarga setempat belum memberi prioritas bagi kepentingan terbaik anak.
- c) Sistem ekonomi dan sosial tidak memberi jaminan dan perlindungan sosial kepada keluarga pekerja sektor informal, seperti buruh lepas, buruh dengan sistem borongan, tukang ojek, pekerja rumah tangga.

VI. KESIMPULAN

Di wilayah Kota Administratif Jakarta Barat terdapat banyak anak yang mengalami penelantaran, pengucilan dan kerentanan. Isu

penelantaran yang menonjol adalah: balita tidak dibawa ke posyandu, bayi tidak diberi Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, anak tidak diimmunisasi dasar lengkap, anak tidak memperoleh akses atas pendidikan anak usia dini (PAUD), anak belum memiliki akte kelahiran dan anak putus sekolah. Sedangkan isu pengucilan yang teridentifikasi meliputi: anak keluarga miskin dikucilkan dari pendidikan, anak dipekerjakan, anak perempuan dipandang tidak perlu sekolah tinggi. Isu kerentanan anak adalah: rawan putus sekolah, rawan terjangkit penyakit menular, rawan menjadi korban bencana, rawan menjadi korban pengaruh buruk lingkungan, rawan menjadi korban kejahatan.

Akar masalah DEV pada anak di Jakarta Barat adalah kelemahan individual ayah dan ibu, sehingga keluarga tidak mampu melaksanakan fungsinya, memenuhi kebutuhan anak, miskin. Mereka cenderung menganut sikap pragmatisme dan permisif. Fasilitas dari luar oleh pemerintah maupun LSM disambut baik oleh masyarakat. Masyarakat, baik tokoh, warga maupun pengurus RT dan RW menyambut baik setiap upaya fasilitasi kegiatan penanganan masalah. Di wilayah Jakarta Barat terdapat beberapa lembaga yang potensial diajak bekerjasama mengatasi isu permasalahan anak. Sejumlah badan usaha telah memperlihatkan komitmennya atas masalah kesejahteraan masyarakat pada umumnya termasuk kesejahteraan anak di wilayah Jakarta Barat.

VII. Rekomendasi

1. Isu penelantaran, pengucilan dan kerentanan anak yang strategis ditangani adalah: 1) Anak rawan putus sekolah dan anak putus sekolah. 2) pendidikan anak usia dini. 3) anak terlantar. 4) anak tidak dibawa ke posyandu. 5) Balita tidak diimmunisasi dasar lengkap. Pemberdayaan Masyarakat berfokus pada Anak sebagai kegiatan penanganan isu DEV anak sebaiknya dilakukan dalam kerangka re-fungsionalisasi keluarga dan re-fungsionalisasi masyarakat.
2. Di setiap wilayah RT atau RW dimana dilakukan penanganan masalah sebaiknya dilakukan melalui proses identifikasi masalah, sumber dan potensi serta dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja. Proses harus melibatkan masyarakat secara

ra luas dan mengintegrasikannya dengan kegiatan terkait. Kegiatan penanganan DEV diposisikan sebagai kegiatan milik masyarakat dan berkembang menjadi gerakan sosial. Hal ini penting karena penanganan DEV tidak dapat diselesaikan sesaat tetapi harus berkelanjutan. Untuk itu, jika belum ada lembaga / organisasi yang memadai untuk maksud tersebut, masyarakat perlu difasilitasi membentuk lembaga baru. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perkumpulan warga dimana masyarakat luas bersinergi saling menguntungkan secara demokratis dan bermartabat. Selanjutnya lembaga tersebutlah yang akan bekerja mengatasi masalah DEV di wilayahnya, sementara Proyek berperan sebagai fasilitator/pendamping. Pembentukan lembaga dimaksud sangat strategis, sangat menentukan keberhasilan melakukan penanganan DEV.

3. Mengatasi anak rawan putus sekolah untuk jangka pendek perlu dilakukan dengan bantuan biaya pendidikan. Bantuan biaya pendidikan sebaiknya diarahkan kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta "kecil", terutama SD kelas 4 sampai kelas 2 SLTA. Pemberian bantuan sebaiknya dilakukan dengan berkoordinasi dengan sekolah dan pengurus RT dan RW setempat. Sebaiknya kegiatan ini merupakan kegiatan lembaga masyarakat yang dimaksud pada poin 2.
4. Mengatasi minimnya akses atas PAUD, Proyek perlu memfasilitasi masyarakat mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD. Kebutuhan akan lembaga PAUD masih sangat tinggi, karena itu fasilitasi pembentukan PAUD sangat potensial dijadikan sebagai salah satu kegiatan/program tersendiri. PAUD sebaiknya berada dibawah perkumpulan masyarakat seperti disebut pada poin 2.
5. Kepada orangtua, terutama keluarga miskin, Proyek perlu memberi penyadaran atas: a) hak-hak anak, termasuk hak atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. b) kewajiban orangtua memenuhi hak-hak anak, sehingga mengurangi sikap pragmatis dan permisif. Orangtua harus memiliki semangat memperjuangkan kepentingan terbaik anak, tidak menyerah dengan kesulitan, apalagi mengeksploitasi anak.
6. Proyek perlu melakukan advokasi, sehingga pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan sumberdaya untuk anak-anak dari keluarga miskin. Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah tidak cukup membantu sekolah-sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta "kecil", karena disalah anak kaum marginal berada. Dalam bidang administrasi kependudukan, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan cross program memenuhi hak anak atas akte kelahiran bagi anak. Dalam bidang pemukiman, pemerintah daerah perlu membantu masyarakat miskin memperbaiki rumah agar layak huni, kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah perlu mengarahkan pelayan kesehatan sekolah sekolah-sekolah swasta "kecil".
7. Proyek perlu: a) memfasilitasi masyarakat untuk menyelenggarakan Tempat Penitipan Anak atau mengintegrasikannya dengan PAUD dan rumah belajar bagi anak usia sekolah; b) penyadaran orangtua untuk tidak membiarkan anak main sepanjang hari. Melalui TPA, PAUD dan rumah belajar diharapkan aktifitas anak di luar rumah semakin terkontrol dan produktif. Kebutuhan atas rumah belajar tampak mendasak di lingkungan padat karena rumah keluarga sangat sempit, fasilitas belajar amat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditto, Santoso; Mendesain Proyek Pemberdayaan Masyarakat Berfokus pada Anak: Sebuah Pedoman, *Christian Children's Fund – Indonesia Office*, Cetakan 1, Jakarta, 2008
- Sitepu, Anwar; Membangun Komunitas Peduli Anak, karya ilmiah untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2004.
-; Jakarta Barat Dalam Angka, 2008, Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
-; Jakarta Barat Dalam Angka, 2009, Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak dalam Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak
- UU No. 6/1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 12/1995 tentang pemasyarakatan
- UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Lampiran 1: Kasus DEV anak

1. Andreas, laki-laki, 8 tahun, putus sekolah.

Andreas putus sekolah ketika baru dua bulan duduk di kelas satu SD, pada tahun ajaran 2009/2010. Ketika ditanya mengapa berhenti sekolah. "Diusir emak" jawabnya dengan suara pelan. Penulis kaget tidak menyangka jawaban seperti itu keluar dari mulut anak sekecil itu. Bagaimana mungkin anak sekecil itu diusir oleh mamanya sendiri. Setelah digali lebih jauh diketahui ternyata mama yang dimaksud adalah mama tiri, isteri ketiga dari Yo, bapak kandung Andreas. Yo sudah menikah tiga kali. Isteri pertama dan kedua sudah cerai, sementara isteri ketiga sudah tidak akur dan telah pisah ranjang sejak tujuh bulan terakhir. Andreas punya adik berapa? "Tiga" Kakak? "satu". Kakak yang dimaksud Andreas ternyata anak pertama dari Yo dari isteri pertama, dan tiga orang adik yang dimaksud adalah anak dari Yo dari isteri ketiga. Sementara Andreas sendiri adalah anak Yo dari isteri kedua. Yo adalah seorang laki-laki keturunan Cibeng (Cina Benteng), sehari-hari bekerja sebagai buruh "pabrik" pengolahan limbah (daur ulang) plastik. "Nasib Andreas menyedihkan. Dia lahir prematur, belum cukup bulan, kecil seperti (menyebut nama binatang). Belum genap dua bulan mamanya pergi meninggalkan dirinya, begitu saja, seperti dijelaskan bibinya. Sejak itu dia diasuh bibinya, saudara ayah. Kemudian setelah Bapaknya menikah lagi, Andreas diasuh ayah dan ibu tirinya. Namun diperlakukan kurang baik, tidak dibagi makan. Andreas hebat, bagaimana pun perlakuan yang diterimanya, dia mengaku bahwa semua anak bapaknya adalah saudaranya, kakak dan adiknya. Andreas sangat berminat kembali sekolah.

2. Uswatun, perempuan, 15 tahun dan Ernawati, perempuan 17 tahun.

Berhenti kelas 5 SD. Alasannya tidak mampu mengikuti pelajaran. Diomeli guru, lalu sakit panas. Tadinya di SDN 03 Kamal, sekitar 600 meter dari rumahnya. Kakak dan kedua orangtua Uswatun sepakat tidak memaksanya meneruskan sekolahnya. "Kasihlah dia tidak mampu ngikuti pelajaran, sudah gak usah sekolah gak apa kata saya ke emak, dari pada sakit" demikian Kakak tertua Uswatun menjelaskan. Kakak Uswatun, bernama Ernawati, perempuan, 17 tahun, berhenti setelah tamat SMP, tahun 2008. Sebenarnya masih mau terus tapi orangtua tidak mampu sediakan biaya. Nilai ketika lulus SMP lumayan bagus, dapat masuk ke SMAN 95 di Pinggir Rawa, kata Bapaknya, yang ikut hadir. Ketika ditanya, apakah Uswatun masih bersedia belajar, dia tidak segera menjawab, terlihat ragu. Ketika dijelaskan belajar paket A bersama anak lain di sekitarnya, dia menyatakan bersedia. Demikian juga Ernawati terlihat ragu. Ayah mereka, Mamad, 56 tahun, bekerja sebagai tukang ojek, penghasilan tidak menentu, cukup untuk makan saja,

sekitar Rp.20.000,- per hari. Beruntung mereka memiliki rumah sendiri, walau kecil tetapi lumayan rapi. Ibu baru saja meninggal, sekitar sebulan lalu (Februari 2010) meninggal karena menderita tumor di kepala selama dua tahun.

3. Puji, laki-laki, 6 tahun bersaudara, anak jalanan ngemis

Semula Puji mengaku bernama K, berumur 6 tahun, tinggal di Utan Jati. Dia berhenti sekolah ketika masih TK, dan belum pernah duduk di SD. Belakangan diketahui Puji mengemis di seputar Mall DM bersama saudara-saudaranya. Ketika disuruh memanggil saudaranya, semula Puji tampak enggan, namun akhirnya dia berteriak keras memanggil nama saudaranya. Sejenak kemudian datang dua orang anak laki-laki, salah seorang lebih besar dari Puji dan seorang lainnya lebih kecil. Ketika ditanya namanya, anak yang besar tersebut mengaku bernama K, ternyata Puji berbohong, pemilik nama K sebenarnya kakak laki-lakinya tersebut. Puji hanya tersenyum ketika dibilang berbohong.

Menyusul kemudian, seorang anak perempuan yang lebih besar dari K sambil menggendong seorang anak kecil. Puji mengusir, "*pergi-pergi, ngapain lu kesini? Pergi*" Kalimat itu diulangi berkali-kali, tetapi kedua orang tersebut tetap mendekat, tidak hirau. Ternyata mereka berlima bersaudara, namanya: 1) Dedeh, perempuan 10 tahun, berhenti sekolah kelas 3 SD, setahun lalu; 2) K, laki-laki, 8 tahun, berhenti sekolah kelas 1 SD, setahun lalu; 3) Puji, laki-laki, 6 tahun, berhenti sekolah TK besar, setahun lalu; 4) Roy, laki-laki 4 tahun, belum pernah sekolah; 5) Bagus, laki-laki, 2 tahun, belum pernah sekolah.

Mereka semua bersaudara sebanyak 10 orang. Seorang, yang paling besar, perempuan, di negara tetangga menjadi TKW, dua orang di Bogor ikut saudara, dua orang sudah meninggal. Menurut penjelasan Dedeh dan K, ayah mereka bekerja sebagai tukang ojek, kadang-kadang main dangdut. Ibunya bekerja sebagai penjaga toko helm di Roxy. Tempat tinggal mereka bukan di Utan Jati seperti dijelaskan Puji, tetapi di Cengkareng Barat. Mereka menempati sebuah rumah kontrakan kecil. Penampilan mereka berlima, layaknya anak jalanan, tampak kurang terawat, kotor, berpakaian kumal. Namun secara fisik semua tampak cukup makan, tidak kurus. Dedeh yang saat itu mengenakan baju pramuka, terkesan masih sekolah, ternyata sudah berhenti.

Tentang kegiatannya di seputar Mall DM, mereka mengatakan "*ngamen*". Tetapi menurut pengamatan mereka lebih tepat disebut pengemis karena mereka bukan menyanyi atau semacamnya, tetapi menghampiri sasaran dan langsung menadahkan tangan, minta uang. Penghasilan yang diperoleh tidak pasti, Dedeh mengatakan "*dua puluh ribu*". Uang tersebut digunakan jajan dan sebagian diberikan kepada ibu. Kegiatan biasanya berlangsung sampai jam 10 malam (Mall DM tutup jam 9 malam, tetapi keramaian di seputar lokasi biasanya sampai jam 10 malam). K mengaku pernah ditangkap Satpol PP kemudian dimasukkan di Panti Sosial di Kedoya, dan beberapa hari kemudian dikembalikan ke orangtuanya. Menurut dia karena dibantu seorang saudara yang berprofesi sebagai militer. Ketika ditanya tentang sekolah, semuanya masih ingin sekolah. Dedeh mengatakan: "*nanti kalo sudah naik-naikan Dedeh sekolah lagi*".

Lampiran 2: Tabel Data

Tabel 1 Banyaknya Anak Usia 0 – 5 Tahun di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kali Deres, Terdaftar dan Memiliki KMS, Ditimbang dan Tidak Ditimbang pada Bulan Januari 2010

NO	INDIKATOR PEMANTAUAN	WILAYAH		
		Kota Jak. Barat	Kec. Cengkareng	Kec. Kali Deres
	TUMBUH KEMBANG ANAK			
1	Jumlah anak usia 0 – 5 tahun	131.142	35.487	27.532
2	Terdaftar di Posyandu dan mendapat KMS	109.092	30.585	19.511
3	Tidak terdaftar	22.150	4.902	8.021
4	Ditimbang pada bulan Januari 2010	56.673	12.017	6.088
5	Tidak ditimbang bulan ini	52.419	18.568	13.423

Sumber: Rekapitulasi Laporan Bulanan Gizi, Sudin Kesehatan Jakarta Barat, Januari 2010;

Tabel 2 Banyaknya Semua Balita dan Rekap Data Balita Gizi Buruk di Kota Adm. Jakarta Barat, bulan Maret 2010.

NO	KECAMATAN	JLH SEMUA BAYI	JLH BGM	BB/UMUR GIZI KURANG	GIZI BURUK	BB/ TINGGI/PANJANG BADAN NORMAL	KURUS	KURUS SEKALI
1	Kembangan	11755	213	164	49	143	21	6
2	Kebun Jeruk	15670	206	135	71	148	50	8
3	Palmerah	13067	181	116	59	97	81	3
4	Grogol-Petam.	10966	91	0	63	52	36	3
5	Tambora	11688	169	106	63	86	65	18
6	Taman Sari	5668	92	36	55	48	36	8
7	Cengkareng	33575	281	166	114	105	139	20
8	Kali Deres	29554	421	266	155	315	80	6
	Jumlah	131.943	1654	989	629	994	508	72

Sumber: Sudin Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat, 21 April 2010; Keterangan : tumbuh kembang bayi diukur dengan rumus 1) BB/Umur, dan 2) BB /TB/PB

BIODATA PENULIS

- * **Anwar Sitepu**, lahir di Sumatera Utara, 4 September 1958, memperoleh gelar magister profesional bidang pengembangan masyarakat dari Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, peneliti pada Puslitbang Kessos, Badiklit, Kementerian Sosial.
- ** **Irmayani**, lahir di Jakarta, 20 Februari 1968, memperoleh gelar Magister Psikologi Sosial dari UGM, peneliti pada Pusbang Tansosmas, Badiklit, Kementerian Sosial.